

Evaluasi Rekomendasi untuk Kawasan Transmigrasi Weri-Saharey

(Evaluation of Recommendations for the Weri-Saharey Transmigration Area)

Vely Brian Rosandi^{1,2}, Alviandra Piero Maulana¹, Sayyidatul Alfi Syifa¹, Mahdi Fajri¹, Dewi Yustika Febriani¹

¹ Fakultas Pertanian, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680

² Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16127

*Penulis Korespondensi: vrosandi@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia terus dipertajam oleh tantangan multidimensi, termasuk kerentanan pangan, perubahan iklim, ketimpangan sosial-ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan sumber daya pembangunan. Kondisi ini memperkuat urgensi intervensi pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas wilayah tertinggal, salah satunya melalui program transmigrasi sebagai instrumen pemerataan spasial dan transformasi sosial-ekonomi. Meskipun demikian, penetapan dan pengelolaan kawasan transmigrasi kerap terkendala oleh minimnya evaluasi berbasis bukti, keterbatasan kajian empiris mengenai kondisi eksisting kawasan, serta kurangnya pelibatan aktor lokal khususnya masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Menanggapi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi komprehensif berbasis data dan partisipasi masyarakat terhadap kondisi aktual kawasan transmigrasi sebagai dasar perumusan rekomendasi tata kelola kolaboratif serta perancangan model kelembagaan korporasi masyarakat pada tahap pengembangan selanjutnya. Pendekatan penelitian memadukan data primer dan sekunder melalui survei lapangan, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelaahan dokumen resmi. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi struktur permasalahan, dinamika sosial-ekonomi, hambatan kelembagaan, serta potensi pengembangan wilayah. Hasil penelitian mengungkap bahwa kawasan transmigrasi Weri-Saharey berada dalam kondisi infrastruktur yang tertinggal, yang berdampak signifikan terhadap dinamika kependudukan, mobilitas sosial, dan kapasitas ekonomi rumah tangga transmigran. Permasalahan hak ulayat dan ketidakpastian kepemilikan tanah menjadi faktor determinan yang menghambat pembangunan infrastruktur dan melemahkan keberlanjutan permukiman transmigran, sehingga mendorong sebagian besar warga untuk relokasi. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi sumber daya yang substansial pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat kendala struktural dan institusional tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa transmigrasi tetap memiliki fungsi strategis sebagai katalis pembangunan wilayah, dengan prasyarat bahwa seluruh proses perencanaan dan implementasinya harus diselaraskan dengan mekanisme adat, resolusi hak ulayat, dan desain tata kelola yang inklusif. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi sosial program, tetapi juga memungkinkan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat lokal maupun transmigran.

Kata kunci: evaluasi kawasan transmigrasi, hak ulayat dan tata kelola, kesenjangan wilayah, potensi sumber daya wilayah, rekomendasi pembangunan perdesaan

ABSTRACT

Regional development disparities in Indonesia continue to be exacerbated by multidimensional challenges, including food vulnerability, climate change, socio-economic inequality, and limited access to basic services and development resources. This condition reinforces the urgency for development interventions capable of enhancing the capacity of disadvantaged regions, one of which is the transmigration program as an instrument for spatial equity and socio-economic transformation. Nevertheless, the designation and management of transmigration areas are often hindered by a lack of evidence-based evaluation, limited empirical studies on the existing conditions of the areas, and the inadequate involvement of local actors—particularly indigenous communities—in planning and decision-making processes. In response to these gaps, this study aims to conduct a comprehensive evaluation based on data and community participation regarding the actual conditions of transmigration areas. This serves as a foundation for formulating collaborative governance recommendations and designing community corporate institutional models for the subsequent development stages. The research approach integrates primary and secondary data through field surveys, in-depth interviews, participatory observation, and official document reviews. Analysis was conducted to identify problem structures, socio-economic dynamics, institutional barriers, and regional development potential. The findings reveal that the Weri-Saharey transmigration area suffers from lagging infrastructure, which significantly impacts population dynamics, social mobility, and the economic capacity of transmigrant households. Issues regarding customary land rights (*hak ulayat*) and land ownership uncertainty are determinant factors that hinder infrastructure development and weaken the sustainability of transmigrant settlements, leading many residents to relocate. Despite this, the area possesses substantial resource potential in the forestry, plantation, agriculture, and fisheries sectors, which remain optimally unutilized due to these structural and institutional constraints. These findings affirm that transmigration maintains a strategic function as a catalyst for regional development, provided that all planning and implementation processes are aligned with customary mechanisms, the resolution of customary land rights, and inclusive governance designs. Such an approach not only strengthens the social legitimacy of the program but also enables the optimization of regional potential in a sustainable and equitable manner for both local communities and transmigrants.

Keywords: customary land rights and governance, regional disparity, regional resource potential, rural development recommendations, transmigration area evaluation